

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas penetapan pajak, surat teguran, surat paksa, dan sanksi administrasi terhadap pencairan tunggakan pajak. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Pada penelitian ini metode pemilihan sampel yang digunakan adalah *sampling* jenuh yang berarti semua populasi dijadikan sampel penelitian. Data yang digunakan merupakan data *time series* dari tahun 2013-2016 dengan data sampel bulanan, maka jumlah data pada penelitian ini adalah 48.

Data yang digunakan pada penelitian ini diperoleh dari daftar surat ketetapan pajak, daftar penagihan pajak, daftar permohonan pengurangan sanksi, daftar sanksi administrasi, dan daftar tunggakan pajak pada KPP Madya Jakarta Timur.

Penelitian ini dilengkapi dengan hasil penelitian terdahulu berupa jurnal dan buku referensi. Model dalam penelitian ini menggunakan empat variabel yaitu kualitas penetapan pajak, surat teguran, surat paksa, sanksi administrasi, dan pencairan tunggakan pajak

1. Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif disajikan untuk memberikan gambaran atau deskripsi atas suatu data variabel yang digunakan dalam penelitian. Variabel yang

digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitas penetapan pajak, surat teguran, surat paksa, sanksi administrasi, dan pencairan tunggakan pajak.

Dibawah ini merupakan hasil dari statistik deskriptif dalam penelitian ini yang terdiri dari nilai minimum, maximum, mean, dan standar deviasi yang disajikan pada tabel IV.1 berikut:

Tabel IV.1
Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PTP	48	.004	.405	.12183	.093703
KPP	48	.007	.992	.63417	.290255
ST	48	.019	.310	.11188	.084338
SP	48	.007	12.603	.51969	1.799842
SA	48	.061	.998	.68758	.264666
Valid N (listwise)	48				

Sumber: SPSS 24, data diolah oleh penulis (2017)

Berdasarkan Tabel IV.1 dapat dilihat bahwa data yang di uji dalam penelitian ini berjumlah 48 sampel, untuk hasil statistik deskriptif dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif pada tabel IV.1, menunjukkan bahwa nilai minimum pencairan tunggakan pajak yang dimiliki KPP Madya Jakarta Timur sebesar 0,004% yaitu terjadi pada Januari 2013. Rendahnya pencairan tunggakan pajak yang terjadi disebabkan oleh tidak dilunasinya tunggakan pajak tepat pada waktunya. Nilai maksimum pencairan

tunggakan pajak sebesar 0.405% yaitu pada September 2016. Meningkatnya angka pencairan tunggakan pajak disebabkan oleh meningkatnya kesadaran wajib pajak dalam membayar tunggakan pajaknya. Sementara itu, nilai rata-rata dari pencairan tunggakan pajak sebesar 0,12183% dengan standar deviasi sebesar 0,093703%.

- 2) Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif pada tabel IV.1, menunjukkan bahwa nilai minimum kualitas penetapan pajak yang dimiliki KPP Madya Jakarta Timur sebesar 0.007% yaitu terjadi pada Juli 2015. Rendahnya kualitas penetapan pajak yang terjadi disebabkan oleh penetapan yang masih banyak berubah dikarenakan permohonan pengurangan sanksi, banding, atau keberatan. Nilai maksimum kualitas penetapan pajak sebesar 0,992% yang berarti pada Januari 2015 nilai ketetapan cenderung tetap, tidak berubah walaupun terdapat permohonan pengurangan sanksi, banding, atau keberatan. Sementara itu, nilai rata-rata dari kualitas penetapan pajak sebesar 0,63417% dengan standar deviasi sebesar 0,290255%.
- 3) Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif pada tabel IV.1, menunjukkan bahwa nilai minimum surat teguran yang dimiliki KPP Madya Jakarta Timur sebesar 0.019% yaitu terjadi pada Maret 2013. Rendahnya surat teguran yang terjadi disebabkan oleh masih banyaknya wajib pajak yang mengabaikan surat teguran yang diterbitkan oleh aparat pajak. Nilai maksimum surat teguran sebesar 0,310% yang berarti pada Mei 2016 surat

teguran mendapatkan respon oleh wajib pajak. Sementara itu, nilai rata-rata dari surat teguran sebesar 0,11188% dengan standar deviasi sebesar 0,084338%.

- 4) Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif pada tabel IV.1, menunjukkan bahwa nilai minimum surat paksa yang dimiliki KPP Madya Jakarta Timur sebesar 0.007% yaitu terjadi pada Januari 2013. Rendahnya surat paksa yang terjadi disebabkan oleh masih banyaknya wajib pajak yang mengabaikan surat paksa yang di terbitkan oleh aparaturnya. Nilai maksimum surat paksa sebesar 12,603% yang berarti pada September 2016 surat paksa mendapatkan respon oleh wajib pajak. Sementara itu, nilai rata-rata dari surat paksa sebesar 0,51967% dengan standar deviasi sebesar 1,799756%.
- 5) Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif pada tabel IV.1, menunjukkan bahwa nilai minimum sanksi administrasi yang dimiliki KPP Madya Jakarta Timur sebesar 0.061% yaitu terjadi pada Januari 2013. Rendahnya sanksi administrasi yang terjadi disebabkan oleh masih banyaknya wajib pajak yang tidak membayarkan sanksi administrasinya. Nilai maksimum sanksi administrasi sebesar 0,998% yang berarti pada Oktober 2014 wajib pajak membayarkan tunggakan pajaknya. Sementara itu, nilai rata-rata dari sanksi administrasi sebesar 0,68758% dengan standar deviasi sebesar 0,264666%.

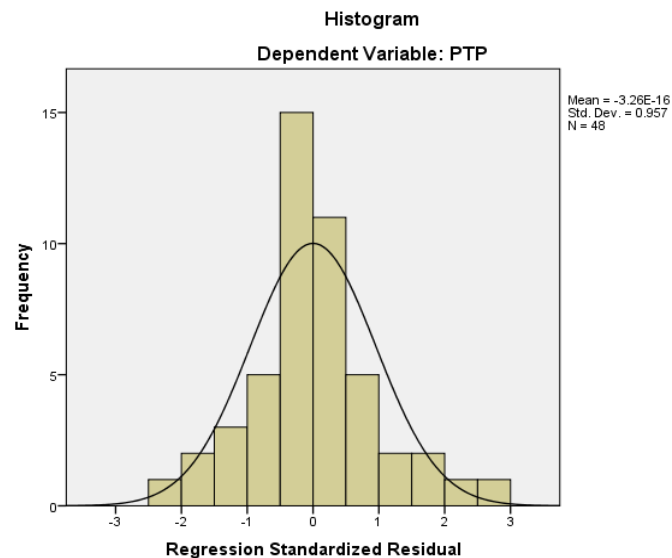
2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel independen dan variabel dependen dalam model regresi memiliki distribusi normal atau tidak. Penelitian ini menggunakan dua cara untuk mendeteksi apakah distribusi data normal atau tidak, yaitu dengan uji grafik dan uji statistik.

1) Uji Grafik

Salah satu cara untuk uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji grafik dengan cara uji *Normal P-Plot* dan histogram. Berikut adalah penjelasan hasil dari grafik uji normalitas dalam penelitian ini:



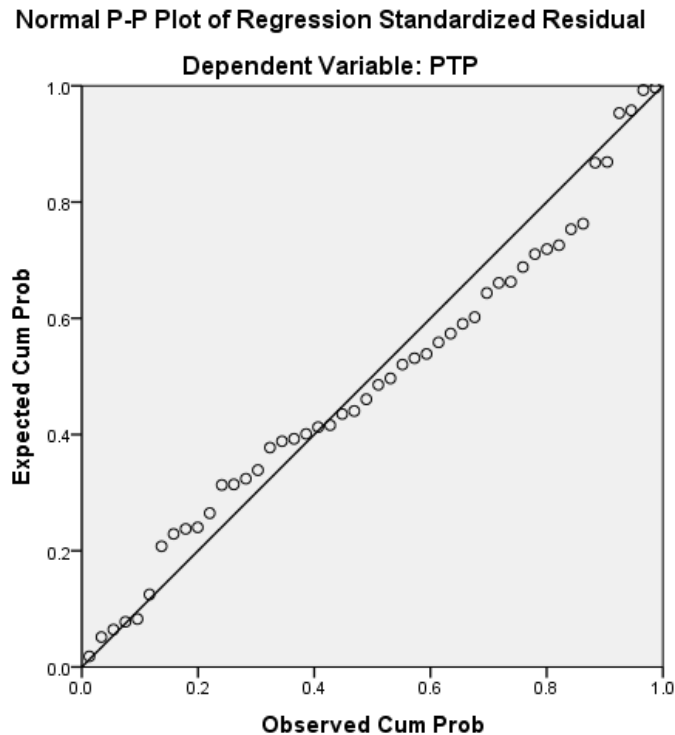
Gambar IV.1

Grafik Histogram

Sumber : SPSS 24, data diolah oleh penulis (2017)

Dapat dilihat pada Gambar IV.1 Grafik Histogram diatas, dapat disimpulkan bahwa grafik histogram menunjukkan pola distribusi yang

tepat ditengah. Hal ini menunjukkan bahwa data terdistribusi secara normal.



Gambar IV.2

Grafik *Normal P-Plot*

Sumber : SPSS 24, data diolah oleh penulis (2017)

Pada Gambar IV.2 Grafik *Normal P-Plot* diatas dapat dilihat bahwa pola penyebarannya yaitu data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka hal tersebut menunjukkan bahwa pola berdistribusi normal. Oleh karena itu dapat dinyatakan model regresi memenuhi asumsi normalitas.

2) Uji Statistik

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji statistik yaitu uji *Kolmogorov-Smirnov*. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Data dapat dinyatakan berdistribusi normal apabila hasil signifikansi lebih besar dari 0,05 atau 5%. Apabila hasil signifikansi di bawah 0,05 atau 5% maka menunjukkan bahwa data yang diuji dalam penelitian tidak normal. Berikut adalah hasil uji *Kolmogorov-Smirnov*:

Tabel IV.2

Uji One Sample Kolmogorov Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		48
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.05569044
Most Extreme Differences	Absolute	.102
	Positive	.102
	Negative	-.076
Test Statistic		.102
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : SPSS 24, data diolah oleh penulis (2017)

Berdasarkan tabel IV.2 dapat dilihat bahwa nilai pada *Asymp. Sig (2-tailed)* adalah 0,200 dimana angka tersebut lebih besar dari tingkat

signifikansi 0,05 atau 5%, maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian berdistribusi normal.

b. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah terjadi korelasi yang sangat tinggi pada hubungan diantara variabel independen dalam penelitian. Pada penelitian ini untuk menguji multikolonieritas menggunakan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai *tolerance*. Jika nilai VIF < 10 atau nilai *tolerance* > 0,10 maka dapat dinyatakan tidak terjadi multikolonieritas. Namun apabila nilai VIF > 10 atau nilai *tolerance* < 0,10 maka diantara variabel bebas penelitian tersebut terdapat gejala multikolonieritas. Berikut penjelasan hasil uji multikolonieritas:

Tabel IV.3
Uji Multikolonieritas

Model		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta					
1	(Constant)	-.035	.031		-1.139	.261		
	KPP	.015	.030	.048	.507	.615	.922	1.084
	ST	.403	.116	.362	3.481	.001	.759	1.318
	SP	.022	.005	.416	4.467	.000	.948	1.055
	SA	.132	.037	.374	3.612	.001	.767	1.303

a. Dependent Variable: PTP

Sumber : SPSS 24, data diolah oleh penulis (2017)

Berdasarkan tabel IV.3 dapat dilihat bahwa dari hasil perhitungan uji multikoloniaritas menunjukkan nilai *tolerance* > 0,10 yaitu sebesar 0.922 untuk variabel Kualitas Penetapan Pajak, 0,759 untuk variabel Surat Teguran, 0,948 untuk variabel Surat Paksa, dan 0,767 untuk variabel Sanksi Administrasi. Selain itu juga nilai VIF menunjukkan < 10 yaitu sebesar 1,084 untuk variabel Kualitas Penetapan Pajak, 1,318 untuk variabel Surat Teguran, 1,055 untuk variabel Surat Paksa, dan sebesar 1,303 untuk variabel Sanksi Administrasi. Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa variabel independen dalam penelitian ini bebas dari gejala multikoloniaritas.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya (t-1). Model regresi yang baik adalah yang terbebas dari autokorelasi. Dalam penelitian ini menggunakan uji Durbin Watson (DW) untuk menguji ada atau tidaknya autokorelasi. Berikut adalah penjelasan hasil uji autokorelasi:

Tabel IV.4
Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.804 ^a	.647	.614	.058223	2.044

a. Predictors: (Constant), SA, KPP, SP, ST

b. Dependent Variable: PTP

Sumber : SPSS 24, data diolah oleh penulis (2017)

Berdasarkan Tabel IV.4 Uji Autokorelasi dapat dilihat bahwa diperoleh nilai DW sebesar 2,044. Berdasarkan tabel Durbin Watson (DW) dengan jumlah sampel (n) = 48 dan jumlah variabel independen (k) = 4, maka diperoleh nilai dL = 1,3619, nilai dU = 1,7206 dan nilai $4-dU$ = 2,2794. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan dalam uji Durbin Watson (DW) maka nilai DW terletak diantara dU dan $4-dU$ ($1,3619 < 2,044 < 2,2794$). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa penelitian ini terbebas dari gejala autokorelasi.

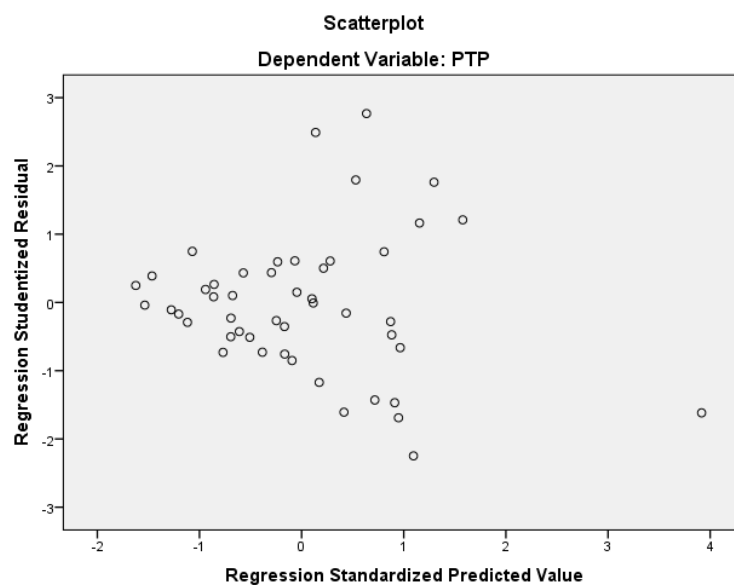
d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terdapat ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Apabila variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka dapat disebut homokedastisitas. Namun apabila terjadi perbedaan dapat disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik yaitu homokedastisitas.

Dalam penelitian ini uji Grafik dilakukan dengan menggunakan grafik *scatterplot* sementara untuk uji statistic menggunakan uji White. Berikut penjelasan hasil dari masing-masing uji yang telah dilakukan

1) Grafik Plot

Untuk *scatterplot* apabila titik-titik dalam hasil uji tersebut membentuk pola tertentu yang teratur seperti bergelombang, melebar kemudian menyempit, maka menunjukkan terjadi heterokedastisitas. Namun apabila tidak membentuk pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka menunjukkan tidak terjadi heterokedastisitas atau dapat disebut homokedastisitas. Berikut hasil dari grafik *scatterplot*:



Gambar IV.3
Uji Heterokedastisitas

Sumber : SPSS 24, data diolah oleh penulis (2017)

Berdasarkan Gambar IV.3 Uji Heterokedastisitas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak tidak membentuk suatu pola tertentu, serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada

sumbu Y. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa penelitian ini terbebas dari adanya gejala heterokedastisitas.

2) Uji White

Dalam uji White hasil yang diperoleh adalah R square (R^2) untuk menghitung c^2 hitung, dimana c^2 hitung = $n \times R^2$. Pengambilan keputusan untuk melihat hasil uji white yaitu apabila c^2 hitung < c^2 tabel maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam penelitian. Berikut hasil dari uji White :

Tabel IV.5

Uji White

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.618 ^a	.382	.120	.00495

a. Predictors: (Constant), SPSA, STkuadrat, KPPkuadrat, SA, KPPST, KPPSA, STSA, SAKuadrat, KPP, ST, SPkuadrat, STSP, KPPSP, SP

Sumber : SPSS 24, data diolah oleh penulis (2017)

Berdasarkan hasil regresi residual kuadrat, menunjukkan hasil R square sebesar 0,382. Dalam uji White hasil yang diperoleh adalah R square (R^2) untuk menghitung c^2 , dimana $c^2 = n \times R^2 = 0,382 \times 48 = 18,336$. Pengambilan keputusan untuk melihat hasil uji white yaitu apabila c^2 hitung < c^2 tabel maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam penelitian. Untuk melihat c^2 tabel dengan df (*degree of freedom*) adalah banyaknya variabel independen dalam

regresi auxiliary dan tingkat signifikansi 0,05 (Utomo, 2007:183). Dalam penelitian ini jumlah variabel dalam regresi auxiliary ada 14 variabel, maka nilai c^2 tabel adalah 23,685. Berdasarkan hasil uji dalam penelitian ini $18,336 < 23,685$ (c^2 hitung $< c^2$ tabel). Maka dapat dinyatakan bahwa penelitian ini terbebas dari gejala heteroskedastisitas.

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Apabila variabel-variabel pada penelitian ini telah terbebas dari masalah uji asumsi klasik, tahap selanjutnya yaitu melakukan analisis regresi linier berganda yang memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel independen yaitu kualitas penetapan pajak, surat ketetapan pajak, surat teguran, dan sanksi administrasi terhadap pencairan tunggakan pajak sebagai variabel dependen. Berikut hasil dari analisis regresi linier berganda:

Tabel IV.6
Analisis Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized
		B	Std. Error	Coefficients Beta
1	(Constant)	-.035	.031	
	KPP	.015	.030	.048
	ST	.403	.116	.362
	SP	.022	.005	.416
	SA	.132	.037	.374

Sumber : SPSS 24, data diolah oleh penulis (2017)

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda yang ditampilkan pada Tabel IV.6, maka dapat dituliskan model regresi sebagai berikut :

$$PTP = -0,035 + 0,015 KPP + 0,403 ST + 0,022 SP + 0,132 SA + e$$

Keterangan:

Y = Pencairan Tunggakan Pajak

KPP = Kualitas Penetapan Pajak

ST = Tunggakan pajak

SP = Surat Paksa

SA = Sanksi Administrasi

e = error

Berdasarkan persamaan regresi maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta negatif sebesar 0,035 artinya apabila semua variabel independen yaitu kualitas penetapan pajak, surat teguran, surat paksa, dan sanksi administrasi bernilai konstan atau 0, maka pencairan tunggakan pajak akan mengalami penurunan sebesar 0,035
- b. Nilai koefisien regresi kualitas penetapan pajak 0,015 artinya apabila variabel independen lain bernilai konstan dan variabel kualitas penetapan pajak mengalami kenaikan 1 satuan maka variabel pencairan tunggakan pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,015
- c. Nilai koefisien regresi variabel surat teguran 0,403 artinya apabila variabel independen lain bernilai konstan dan variabel surat teguran mengalami kenaikan 1 satuan maka variabel pencairan tunggakan pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,403
- d. Nilai koefisien regresi variabel surat paksa 0,022 artinya apabila variabel independen lain bernilai konstan dan variabel surat paksa mengalami

kenaikan 1 satuan maka variabel pencairan tunggakan pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,022

- e. Nilai koefisien regresi variabel sanksi administrasi 0,132 artinya apabila variabel independen lain bernilai konstan dan variabel sanksi administrasi mengalami kenaikan 1 satuan maka variabel pencairan tunggakan pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,132

B. Pengujian Hipotesis

1. Uji t

Tujuan dari uji t dalam penelitian untuk mengetahui seberapa jauh masing-masing variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Apabila $t_{tabel} < t_{hitung}$ maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, dan apabila taraf signifikansi kurang dari 0,05 maka dapat dikatakan ada pengaruh yang kuat antara variabel dependen dengan variabel independen. Berikut adalah tabel hasil uji t dalam penelitian ini

Tabel IV.7
Uji t

Model		t	Sig.
1	(Constant)	-1.139	.261
	KPP	.507	.615
	ST	3.481	.001
	SP	4.467	.000
	SA	3.612	.001

Sumber : SPSS 24, data diolah oleh penulis (2017)

Berdasarkan Tabel IV.7 dapat dijelaskan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen berdasarkan hipotesis yang telah dibuat. Berikut penjelasan atas hasil pengujian masing-masing hipotesis:

a. Pengujian Hipotesis 1

Hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini menyatakan bahwa kualitas penetapan pajak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Madya Jakarta Timur. Berdasarkan hasil uji t yang telah ditampilkan pada tabel IV.7 dapat dilihat bahwa variabel kualitas penetapan pajak memiliki t_{hitung} sebesar 0,507 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,615. Hal ini menunjukkan bahwa $t_{tabel} < t_{hitung}$ ($2,01669 > 0,507$) dan nilai signifikan variabel $0,615 > 0,05$ sehingga H1 ditolak dan dapat disimpulkan bahwa kualitas penetapan pajak tidak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Madya Jakarta Timur.

b. Pengujian Hipotesis 2

Hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini menyatakan bahwa surat teguran berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Madya Jakarta Timur. Berdasarkan hasil uji t yang telah ditampilkan pada tabel IV.7 dapat dilihat bahwa surat teguran memiliki t_{hitung} sebesar 3,481. Hal ini menunjukkan bahwa $t_{tabel} < t_{hitung}$ ($2,01669 < 3,481$) dan signifikansi sebesar 0,001. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikan variabel $0,001 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima yaitu surat teguran

berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Madya Jakarta Timur.

c. Pengujian Hipotesis 3

Hipotesis ketiga (H3) dalam penelitian ini menyatakan bahwa surat paksa berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Madya Jakarta Timur. Berdasarkan hasil uji t yang telah ditampilkan pada tabel IV.7 dapat dilihat bahwa surat paksa memiliki t_{hitung} sebesar 4,467. Hal ini menunjukkan bahwa $t_{tabel} < t_{hitung}$ ($2,01669 < 4,467$) dan signifikansi sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikan variabel $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima yaitu surat paksa berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Madya Jakarta Timur.

d. Pengujian Hipotesis 4

Hipotesis keempat (H4) dalam penelitian ini menyatakan bahwa sanksi administrasi berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Madya Jakarta Timur. Berdasarkan hasil uji t yang telah ditampilkan pada tabel IV.7 dapat dilihat bahwa sanksi administrasi memiliki t_{hitung} sebesar 3,612. Hal ini menunjukkan bahwa $t_{tabel} < t_{hitung}$ ($2,01669 < 3,612$) dan signifikansi sebesar 0,001. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikan variabel $0,001 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H4 diterima yaitu sanksi administrasi berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Madya Jakarta Timur.

2. Uji F

Uji F bertujuan untuk menguji bagaimana pengaruh sekelompok variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Kriteria yang digunakan adalah apabila ($F_{hitung} > F_{tabel}$) atau ($\alpha < 0,05$) maka variabel independen berpengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen. Dengan derajat kepercayaan 5%, df 1 (jumlah variabel-1) = 4, dan df 2 (n-k-1) atau 48-4-1 = 43 (n adalah jumlah observasi dan k adalah jumlah variabel independen), hasil diperoleh untuk F_{tabel} sebesar 2,59. Berikut tabel hasil uji F dalam penelitian ini:

Tabel IV.8

Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.267	4	.067	19.684	.000 ^b
	Residual	.146	43	.003		
	Total	.413	47			

a. Dependent Variable: PTP

b. Predictors: (Constant), SA, KPP, SP, ST

Sumber : SPSS 24, data diolah oleh penulis (2017)

Berdasarkan tabel IV.8 diatas dapat dilihat bahwa semua variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap pencairan tunggakan pajak. Hal ini dapat diketahui dari nilai ($F_{hitung} > F_{tabel}$) yaitu $19,684 > 2,59$ dan signifikansi sebesar 0,000 yang menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 atau 5%. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini semua variabel independen yaitu kualitas penetapan pajak, surat teguran,

surat paksa, dan sanksi administrasi secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Madya Jakarta Timur.

3. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk menjelaskan sejauh mana variabel independen dapat menerangkan variasi variabel dependen. Semakin besar nilai koefisien determinasi maka menunjukkan bahwa semua variabel independen memberikan hampir seluruh informasi yang diperlukan untuk memprediksi variabel dependen. Berikut adalah tabel hasil uji koefisien determinasi:

Tabel IV.9
Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.804 ^a	.647	.614	.058223

Sumber : SPSS 24, data diolah oleh penulis (2017)

Berdasarkan tabel IV.9 dapat dilihat bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,614 atau 61,4%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa 61,4% dari pencairan tunggakan pajak pada KPP Madya Jakarta Timur dipengaruhi oleh variabel-variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu kualitas penetapan pajak, surat teguran, surat paksa, dan sanksi administrasi. Sementara 38,6% lainnya dijelaskan oleh variabel-variabel independen lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

C. Pembahasan

1. Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

Hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini menyatakan bahwa kualitas penetapan pajak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Madya Jakarta Timur. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rochmawati (2015) yang menyatakan bahwa kualitas penetapan pajak tidak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak. Menurut Wakil Kepala Seksi Penagihan Pajak KPP Madya Jakarta Timur, hal tersebut dapat terjadi karena tunggakan yang dihasilkan dari surat ketetapan pajak jumlahnya tergolong kecil karena hanya mengenakan kekurangan bayar hasil pemeriksaan dari pelaporan SPT yang dilakukan wajib pajak sementara itu pada KPP Madya Jakarta Timur, tunggakan pajak mayoritas berasal dari wajib pajak yang benar-benar belum membayarkan kewajibannya. Selain itu juga Surat Ketetapan Pajak lebih bersifat menghimbau wajib pajak agar membayar kekurangan pajaknya, tidak ada tekanan yang cukup besar untuk menekan wajib pajak agar mau membayarkan pajaknya.

Berikut ini merupakan Kategorisasi Kualitas Penetapan Pajak KPP Madya Jakarta Timur:

Tabel IV.10
Kategorisasi Kualitas Penetapan Pajak KPP Madya Jakarta Timur

No	Kualitas penetapan	Jumlah
1	Sangat Baik (80-100%)	18
2	Baik (60-80%)	8
3	Kurang Baik (40-60%)	12
4	Tidak Baik (20-40%)	6
5	Sangat Tidak Baik (0-20%)	4
	Jumlah	48

Sumber: KPP Madya Jakarta Timur, diolah oleh penulis (2017)

Berdasarkan data yang telah peneliti olah dan kelompokkan, dapat dilihat pada tabel IV.10 disimpulkan bahwa Kualitas Penetapan Pajak yang ditetapkan melalui surat ketetapan pajak cenderung baik. Hal tersebut tercermin dari 18 keputusan yang bersifat sangat baik dan 8 keputusan yang bersifat baik. Sementara itu, kualitas penetapan yang cenderung tergolong kurang baik sebanyak 12 keputusan, kualitas penetapan yang cenderung tidak baik berjumlah 6 keputusan, dan kualitas penetapan yang sangat tidak baik berjumlah 4 keputusan. Meskipun dapat dikatakan tergolong baik, namun pada KPP Madya Jakarta Timur hal tersebut tidak dapat mempengaruhi pencairan

tunggakan pajak. Nominal tunggakan yang dihasilkan dari surat ketetapan pajak yang tidak terlalu besar merupakan salah satu faktor yang menyebabkan semakin tinggi atau semakin rendahnya suatu penetapan pajak tidak mempengaruhi pencairan tunggakan pajak.

2. Pengaruh Surat Teguran terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

Hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini menyatakan bahwa surat teguran berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Madya Jakarta Timur. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syahputra (2015), Rahayu (2016), dan Saputri (2015) yang menyatakan bahwa surat teguran berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak. Melalui hasil pengolahan data, dapat diketahui adanya pengaruh positif antara surat teguran terhadap pencairan tunggakan pajak.

Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa surat teguran merupakan faktor yang menentukan kenaikan atau penurunan pencairan tunggakan pajak. Walaupun Surat Teguran tidak bersifat memaksa, namun pada prosesnya Surat Teguran merupakan surat peringatan kepada wajib pajak sebelum dilakukannya pemaksaan yang bersifat hukum yaitu Surat Paksa. Oleh sebab itu, tindakan ini dilakukan untuk membuat wajib pajak takut untuk kembali mengabaikan dan tidak membayarkan tunggakan pajaknya. Apabila surat teguran dilakukan secara tepat dan intensif, maka akan menyebabkan pencairan tunggakan pajak meningkat namun sebaliknya, apabila surat teguran tidak dilakukan dengan tepat dan intensif, maka akan menyebabkan pencairan tunggakan pajak

semakin menurun. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin meningkatnya angka surat teguran maka pencairan tunggakan juga semakin mengalami peningkatan. Hasil analisis tersebut sesuai dengan tujuan penerbitan surat teguran yaitu merupakan tindakan yang dilakukan sebagai alat untuk meningkatkan pembayaran tunggakan pajak.

3. Pengaruh Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

Hipotesis ketiga (H3) dalam penelitian ini menyatakan bahwa surat paksa berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Madya Jakarta Timur. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rochmawati (2015), Maydila (2014), Saputri (2015) yang menyatakan bahwa surat paksa berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak.

Berdasarkan hasil pengolahan data menunjukkan bahwa surat paksa berpengaruh signifikan positif terhadap pencairan tunggakan pajak yang berarti bahwa semakin meningkat angka Surat Paksa maka pencairan tunggakan pajak juga akan meningkat. Surat paksa merupakan tindakan yang penting untuk dilakukan karena memiliki kekuatan hukum yang kuat untuk menagih tunggakan pajak. Wajib pajak akan merasa tertekan oleh Surat Paksa tersebut, karena setelah jangka waktu 2 hari apabila tunggakan pajaknya masih belum dibayarkan juga aparat pajak akan menindak tegas dengan melakukan penyitaan barang-barang yang dimiliki oleh wajib pajak lalu melelangnya. Oleh karena itu, jika surat paksa dilaksanakan secara intensif, maka akan dapat meningkatkan pencairan jumlah tunggakan pajak namun sebaliknya, jika surat

paksa tidak dilakukan dengan intensif maka akan menyebabkan pencairan tunggakan pajak semakin kecil.

4. Pengaruh Sanksi Administrasi terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

Hipotesis keempat (H4) dalam penelitian ini menyatakan bahwa sanksi administrasi berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Madya Jakarta Timur. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardani (2014) dan Syahputra (2015) yang menyatakan adanya pengaruh yang signifikan dari sanksi administrasi terhadap pencairan tunggakan pajak.

Berdasarkan hasil pengolahan data menunjukkan bahwa sanksi administrasi berpengaruh signifikan positif terhadap pencairan tunggakan pajak yang berarti bahwa semakin meningkatnya angka sanksi administrasi maka pencairan tunggakan pajak juga akan meningkat. Dapat ditarik kesimpulan bahwa banyaknya wajib pajak yang menerima sanksi administrasi merupakan tanda bahwa wajib pajak di Indonesia masih banyak yang lalai atas peraturan-peraturan perpajakan. Oleh karena itu, wajib pajak harus diberikan sanksi yang ketat agar tidak melanggar peraturan-peraturan perpajakan. Di sisi lain, wajib pajak secara psikologis pasti merespon hal tersebut dengan langsung membayar tunggakan pajak karena mereka tidak ingin denda yang dikenakan meningkat jika masih mengabaikan tunggakan pajaknya. Jika jumlah wajib pajak yang menerima sanksi mengalami peningkatan maka pencairan tunggakan pajak juga akan meningkat. Demikian sebaliknya, jika jumlah wajib pajak yang menerima sanksi mengalami penurunan maka pencairan tunggakan pajak akan menurun.